



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS TASWANTO
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 99231

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 515 m2/400 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
8. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
9. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **338.300.000**



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY MOTOR METIC Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 6.800.000
3. MOBIL, HONDA ALL NEW HONDA HR-V 1.5L E CVT Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.026.138.680
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	239.169.821
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.138.608.501
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.138.608.501

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.